

## Analisis Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori

Jumela Balkis<sup>1</sup>, Desy Mardhiah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [desy\\_padang@yahoo.com](mailto:desy_padang@yahoo.com)

### Abstrak

Mencuatnya kembali isu pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, seiring kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Memberikan dampak signifikan terhadap diproduksinya kembali novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang mengungkapkan strategi normalisasi kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Artikel ini bertujuan untuk mengulas bagaimana kekuasaan dan pengetahuan digambarkan dalam novel Laut Bercerita. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis wacana kritis (AWK) oleh Norman Fairclough. Terdiri atas tiga level analisis yaitu text, discource practice, dan sociocultural practice. Pengumpulan data melalui dua cara, yaitu studi dokumen dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori kekuasaan dan pengetahuan oleh Michel Foucault. Penelitian ini menarik karena masih sedikit ditemukan dalam studi sosiologi tentang novel yang didominasi oleh studi ilmu bahasa sehingga perlunya kajian sosiologi dalam menguak ideologi dan manipulasi di balik sebuah wacana. Temuan menunjukkan bahwa kekuasaan dalam novel Laut Bercerita tersebar luas dalam sistem hubungan dan interaksi lembaga sosial seperti lembaga hukum, militer, pendidikan dan media. Pengetahuan diproduksi oleh kekuasaan melalui lembaga lembaga sosial tersebut, terkait dengan pemberian stereotip komunis yang melabeli kelompok Winatra dan Wirasena dalam novel Laut Bercerita, sehingga melegitimasi tindakan represif aparat terhadap kelompok Winatra dan Wirasena, yang berujung pada praktik impunitas terhadap pelaku. Sehingga dikategorikan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu di bawah rezim Orde Baru. Kekuasaan dan pengetahuan yang digambarkan dalam novel melalui narasi yang dibangun penulis menjadikan novel ini sebagai bentuk resistensi penulis terhadap isu pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis; HAM; Novel Laut Bercerita.

### Abstract

The resurgence of the issue of unresolved past human rights violations, following Prabowo Subianto's victory in the 2024 presidential election, has had a significant impact on the release of Leila S. Chudori's novel *Laut Bercerita*, which reveals the strategy of normalizing past human rights violations. This article aims to review how power and knowledge are depicted in the novel *Laut Bercerita*. This paper uses a descriptive qualitative method with critical discourse analysis (CDA) by Norman Fairclough. It consists of three levels of analysis, namely text, discourse practice, and sociocultural practice. Data collection was carried out in two ways, namely document study and literature study. This research is analyzed using Michel Foucault's theory of power and knowledge. This research is interesting because it is still rarely found in sociological studies of novels, which are dominated by linguistic studies, thus necessitating sociological studies to uncover the ideology and manipulation behind a discourse. The findings indicate that power in the novel *Laut Bercerita* is widely distributed within the system of relationships and interactions between social institutions such as legal, military, educational, and media institutions. Knowledge is produced by power through these social institutions, related to the labeling of the Winatra and Wirasena groups as communists in the novel *Laut Bercerita*, thereby legitimizing the repressive actions of the authorities against the Winatra and Wirasena groups, which resulted in impunity for the perpetrators. This is categorized as a serious human rights violation in the past under the New Order regime. The power and knowledge depicted in the novel through the narrative constructed by the author make this novel a form of resistance by the author against the issue of unresolved serious human rights violations.

**Keywords:** Critical Discourse Analysis; Human Right; Novel *Laut Bercerita*.

**How to Cite:** Balkis, J. & Mardhiah, D. (2025). Analisis Kekuasaan dan Pengetahuan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 8(3), 286-297.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Isu mengenai HAM di Indonesia kembali menjadi sorotan media massa, seiring dengan kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilu Pilpres 2024. Pada tahun 2023 lalu menurut [Setneg \(2023\)](#) Joko Widodo mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejalan dengan itu, penindakan HAM oleh pemerintah dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, dalam sidang Tinjauan Penerapan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (KIHSP) bahwa pemerintah Indonesia cenderung memberikan respon yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Berkaitan dengan isu pembunuhan di luar hukum, situasi di Papua dan pengusutan pelanggaran HAM berat di masa lalu ([Amnesty, 2024](#)). Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM, seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum dalam HAM. Dimana UU No 39 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa hak asasi seseorang mempunyai resiprokalitas dengan kewajiban hak asasi ([Pemerintah Republik Indonesia, 1999](#)).

Sementara itu adanya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 mengenai proses penyelesaian Non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial. Efektifitas penyelesaian Non-yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat dinilai rendah karena dipengaruhi oleh interpretasi norma hukum, nilai moral, dan kepentingan sosial yang tidak seimbang, sehingga korban belum merasakan keadilan yang nyata dalam tinjauan sosiologi hukum ([Putra & Irwansyah, 2019](#)). Kenyataannya, penanganan kasus pelanggaran HAM dinilai belum efektif jika dilihat dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum ada pertanggungjawaban hukum dengan jelas dan keadilan bagi para korban, adanya penolakan terhadap upaya penyelesaian Non-yudisi dari korban dan keluarga korban seperti Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) serta Maria Catarina, keluarga korban tragedi Semanggi 1 dan lembaga masyarakat sipil seperti kontraS, Imparsial, LBH Jakarta, serta INSESIUM ([Jasmine, 2024](#); [Nastitie, 2024](#); [Nurita, 2022](#)). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen sejati pemerintah untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Berbagai kritikan diupayakan oleh masyarakat agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat terselesaikan dengan baik. Kritikan itu salah satunya disampaikan dalam bentuk karya sastra berupa novel. Novel-novel populer yang mengkritik pemerintah diantaranya novel Y. B. Mangunwijaya tahun 1981 dengan judul *Burung-Burung Manyar*, Ahmad Tohari pada tahun 2002 yang berjudul *Orang-Orang Proyek*, Eka Kurniawan tahun 2002 dengan judul *Cantik Itu Luka*, Lelaki Harimau tahun 2004, Laksmi Pamuntjak tahun 2012 berjudul *Amba*, Leila S. Chudori dengan judul *Pulang* tahun 2012 dan *Laut Bercerita* tahun 2017 dan Arafat Nur tahun 2020 yang berjudul *Kawi Martin di Negeri Anjing* [Anindita \(2024\)](#). Novel *Laut Bercerita* memuat tema yang menarik dan proaktif dalam menyampaikan peristiwa penghilangan paksa 13 aktivis mahasiswa yang terpinggirkan dengan latar tahun 1998. Praktik-praktik hegemoni pemerintah Orde Baru yang otoriter dan represif digambarkan Leila dalam narasi peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh tokoh Biru Laut sebagai salah satu dari 12 korban penghilangan paksa yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi negara Indonesia. Kelompok aktivis mahasiswa, buruh dan petani yang menyuarakan hak-hak mereka justru dianggap sebagai kelompok oposisi, dengan stigma keterlibatan mereka dengan PKI. Strategi pemerintah dalam melanggengkan kekuatannya tersebar melalui aparat pemerintah, media dan kebijakan publik guna mengekang gerakan aktivis mahasiswa Winatra ([Chudori, 2017](#)). Sosok Leila S. Chudori di samping sebagai penulis novel ia juga bekerja di bidang jurnalis di *Harian Kompas*, membuatnya dekat dengan berbagai persoalan dan realitas di masyarakat. Hal itu terlihat pada karya-karya Leila dalam membangun narasi yang jauh dari doktrin dan pengaruh kepentingan politik tertentu.

Kritik Leila terhadap isu HAM berat di masa lalu juga tampak dalam karyanya berjudul *Pulang* pada tahun 2012, yang menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh para eksil politik di masa Orde Baru. Diikuti oleh karyanya yang populer hingga saat ini yaitu novel *Laut Bercerita* terbit pada tahun 2017 menjadi objek penelitian karena memperoleh penghargaan yang diberikan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) AWARD, suatu asosiasi penerbitan buku di Indonesia, tahun 2022. Novel ini juga diadaptasi menjadi film pendek dengan judul yang sama yang diperankan oleh Dian Sastro dan Reza Rahardian. Meskipun pada tahun 2020 terbit pula novel terbaru berjudul *Kawi Martin di Negeri Anjing* karya Arafat Nur namun penghargaannya diperoleh pada tahun 2020. Hal menarik lainnya dari novel *Laut Bercerita*

adalah penjualan novel *Laut Bercerita* berdasarkan postingan Leila S. Chudori di akun Instagramnya @Leilachudori yang mencapai 100.000 eksamplar di tahun 2021-2022.



**Grafik 1. Kenaikan cetakan ulang novel *Laut Bercerita* (2017-2025)**

Sumber: (Astuti, 2025)

Berdasarkan grafik, menunjukkan adanya peningkatan signifikan cetakan ulang novel *Laut Bercerita* bahkan setelah berselang delapan tahun dari awal perilisannya. Grafik menunjukkan bahwa adanya cetakan sebanyak 100 kali cetakan ulang pada Juli 2025. Dengan demikian novel *Laut Bercerita* masih populer hingga saat ini. Kenaikan itu sejalan dengan isu-isu yang banyak disoroti masyarakat saat ini, dimana tokoh-tokoh yang dikaitkan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu justru menempati posisi strategis pemerintahan yang menjadi pembahasan utama dalam novel *Laut Bercerita*. Sehingga novel ini relevan dengan minat pembaca terhadap isu-isu HAM. Populernya novel ini tidak terlepas dari narasi yang dibangun Leila dalam menggugah pembaca dan memunculkan kembali realitas-realitas terhadap berbagai isu khususnya kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan aparat pemerintah, apabila dibandingkan dengan novel yang lain dengan tema yang sama. Tidak hanya itu novel ini juga mengungkapkan strategi normalisasi sistem kekuasaan terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini belum terselesaikan. Sehingga novel ini menjadi salah satu bentuk kritikan yang sangat realistis terhadap pemerintah.

Novel *Laut Bercerita* sebagai sebuah kritik terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang dilatari peristiwa terjadinya penghilangan paksa 13 orang aktivis dan mahasiswa organisasi Winatra (Chudori, 2017). Bisa jadi peristiwa itu adalah gambaran yang sesungguhnya terhadap realitas penghilangan paksa mahasiswa dan aktivis pro demokrasi di tahun 1998. Pelanggaran ini pada akhirnya menjadi tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada masa kepemimpinan Suharto yang mendapat pengakuan dari Presiden Joko Widodo di tahun 2023. Leila Salikha Chudori, penulis novel *Laut Bercerita*, menurut penelitian Sahertian (2024) memiliki posisi ideologis sebagai seorang figur resistensi dalam sebuah pertarungan dominasi yang berada di sisi kelompok yang menolak untuk didominasi dalam perspektif Gramsci. Berangkat dari penelitian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kekuasaan dan pengetahuan Michel Foucault digambarkan dalam teks novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori khususnya dalam konteks pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Orde Baru di Indonesia menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Novel *Laut Bercerita* mampu merepresentasikan serta menyuarakan realitas sosial dibalik peristiwa penghilangan paksa tahun 1998. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kekuasaan dan pengetahuan pemerintah Orde Baru digambarkan, sehingga kasus pelanggaran HAM dapat dinormalisasi dan menjadikannya sebagai rezim kebenaran. Sudah banyak studi-studi pada novel *Laut Bercerita* diantaranya, Daud (2024) mengkaji penggambaran masyarakat, struktur kelas dan interaksi karakter tokoh dalam novel *Laut Bercerita* dengan pendekatan sastra. Studi Nainggolan (2023) menemukan jenis-jenis makna semantik dalam novel *Laut Bercerita* dengan pendekatan linguistik. Studi Putri (2023) menjelaskan orientasi budaya dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori terhadap waktu yang meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. Penelitian Yolanda (2023) menjelaskan masalah sosial dan implikasinya pada pembelajaran dalam teks novel *Laut Bercerita* pada kajian bahasa Indonesia. Penelitian Ginting (2023) menungkapkan eksistensi perempuan di tengah dominasi pria dalam novel *Laut Bercerita* digambarkan melalui tokoh Kinan, Anjani dan Asmara pada

kajian Feminisme Eksistensialis dan relevansinya sebagai materi ajar Sastra Indonesia di SMA. Penelitian Meitridwiastiti (2022) berfokus pada kajian linguistik yang menganalisis berbagai penggunaan gaya bahasa dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori.

Berdasarkan studi sebelumnya kajian tentang novel *Laut Bercerita* umumnya mengungkapkan struktur naratif dan gaya bahasa dengan menunjukkan masalah-masalah sosial, nilai sosial yang muncul dalam novel dan eksistensi perempuan dalam gerakan aktivis mahasiswa. Namun ruang lingkupnya masih dalam ranah studi sastra dan psikologi sehingga belum ditemukan dalam kajian sosiologi. Sementara, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan dan pengetahuan dari Michel Foucault, dimana penggunaan teori sosiologi adalah pembeda antara kajian sosiologi dengan kajian disiplin ilmu lainnya. Teori kekuasaan dan pengetahuan ini menjadi fondasi utama peneliti dalam menentukan fokus penelitian ini bagaimana kekuasaan dan pengetahuan pemerintah Orde Baru digambarkan dalam teks novel *Laut Bercerita*. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena isu pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan. Sehingga perlunya kajian sosiologi dalam menguak ideologi dan manipulasi di balik sebuah wacana yang dilihat melalui narasi Leila S. Chudori dalam novel *Laut Bercerita*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough (Fairclough, 2010). Penelitian ini dilakukan lebih kurang tiga bulan pada tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka yang dilakukan pada media cetak berupa novel *Laut Bercerita* sebanyak 379 halaman (Chudori, 2017). Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis literatur terdahulu yang membahas aspek kekuasaan dan pengetahuan dalam era tersebut, serta membandingkannya dengan representasi yang ada dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori. Sementara itu studi pustaka dipakai untuk alat penguat dalam mencari dan menggali informasi yang diidentifikasi dengan subjek dan teori-teori yang utama tentang masalah penelitian yang diteliti. Data ini didapatkan dari buku terkait teori Michel Foucault (Foucault, 1972) dan metode dari Norman Fairclough, artikel-artikel yang berkaitan dengan sudi relevan terhadap novel *Laut Bercerita*, serta web seperti Kompas.id dan BBC untuk data pendukung. Data yang di dapatkan peneliti melakukan proses mengamati dan membaca berulang-ulang novel *Laut Bercerita* serta mengaitkannya dengan beberapa kajian-kajian terdahulu yang relevan. Analisis data menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough yang membagi analisis tersebut menjadi tiga level analisis yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* (Fairclough, 2010). Ketiga level analisis ini digunakan peneliti untuk menganalisis kekuasaan dan pengetahuan yang digambarkan dalam novel *Laut Bercerita*. *Pertama*, level analisis *text* (mikro) dilakukan dengan mengkaji aspek leksikal (kosakata), semantik, sintaksis (tata kalimat), koherensi, dan kohesivitas. Berbasis pada teori fungsi bahasa Halliday, yang menjabarkan kegunaan bahasa menjadi tiga yaitu ideasional (merepresentasikan realitas), interpersonal (membangun relasi sosial), dan tekstual (menganjurkan teks) (Halliday, 1993). *Kedua*, Level *discourse practice* (meso) berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi teks. *Ketiga*, level *sociocultural practice* (makro) mencakup ruang-ruang sosial yang luas, seperti konteks situasi, konteks dari praktik institusi dari latar novel itu yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, budaya dan politik tertentu (Wodak & Meyer, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berangkat dari pendekatan Norman Fairclough yang membangun model analisis untuk mengkaji bahasa media, yang bekerja secara ideologis memengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dalam sistem sosial, termasuk hubungan kelas, gender, etnis, dan hubungan antara kelompok-kelompok tertentu seperti politisi atau ilmuwan dan massa penduduk (Fairclough, 2010). Oleh karena itu, kerangka awal dengan memahami representasi, identitas, dan hubungan relevan dalam suatu media. Novel *Laut Bercerita* dilihat melalui pilihan kata dan bahasa penulis, mengonstruksi narasi sedemikian rupa menjadi ide-ide kritis terhadap suara-suara yang termarginalkan dan menjadi resistensi penulis terhadap kondisi sosial pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terpinggirkan di Indonesia. Analisis peneliti terhadap novel *Laut Bercerita* berdasarkan dari data-data yang telah dikumpulkan akan dijabarkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan kekuasaan dan pengetahuan dalam teks novel *Laut Bercerita*. Berikut hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

### Normalisasi Rezim Kebenaran Pemerintah Orde Baru melalui Pengetahuan

Rezim Orde Baru digambarkan dengan memproduksi pengetahuan dominan yang memunculkan nama baik Soeharto sebagai bapak Pembangunan Indonesia, sejalan dengan kebijakan-kebijakan lainnya rezim ini memunculkan kontrol sosial yang melegitimasi pengetahuan untuk menetapkan sesuatu yang benar dan salah, berdampak pada suara-suara kritis yang dikekang dalam masyarakat sebagai upaya

menuntut keadilan atas kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat sipil, namun mereka yang kritis justru dikategorikan sebagai kelompok oposisi oleh negara. Secara tersirat diungkapkan novel melalui teks-teks yang dibangun penulis dengan penggambaran situasi aktivis mahasiswa yaitu kelompok Winatra dan Wirasena mengalami situasi konflik politik, ketakutan, dan ancaman yang dikategorikan sebagai wujud keberhasilan kontrol sosial dalam masyarakat, hal itu sesuai dengan sinonim frase *bermalam dengan aman, penangkapan*, dan *panas* menunjukkan kontrol pemerintah terhadap situasi yang dihadapi oleh kelompok Winatra dengan adanya ketidakmampuan dalam mendapatkan kebebasan berdiskusi pemikiran kritis dari tokoh-tokoh seperti Karl Marx dan Pramoedya yang dianggap memproduksi pengetahuan terlarang. Ada kebutuhan fundamental yang tidak terpenuhi di bawah rezim represif, menggambarkan posisi aktivis mahasiswa dalam kondisi rentan terhadap ancaman eksternal khususnya aparat pemerintah. Hal itu berkaitan dengan keberhasilan kontrol dan disiplin terhadap tubuh dan pikiran kelompok Winatra melalui pengetahuan yang disebar oleh pemerintah mengenai apa yang dianggap normal dan menyimpang dari sumber bacaan yang terlarang di bawah rezim Orde Baru sehingga aktivis mahasiswa dalam konteks ini digambarkan sebagai objek yang pasif. Diikuti melalui penggalan dialog berikut:

“...Di sanalah kawan-kawan sesama pers mahasiswa diam-diam menggandakan beberapa bab novel Anak Semua Bangsa... langganan kami berbuat dosa... yang membuat aparat pemerintah gatal-gatal” (Chudori: 17, 17).

Kalimat di atas merepresentasikan tindakan kelompok aktivis mahasiswa Winatra yang dilakukan secara tersembunyi akibat adanya tekanan situasi politik yang diterapkan pemerintah Orde Baru, *wording* atau pilihan kata *diam-diam* merepresentasikan adanya norma sosial yang melarang keterlibatan mereka dalam politik, berasal dari pemikiran yang beredar telah diinternalisasi oleh aktivis mahasiswa sehingga memunculkan tindakan berupa *diam-diam* sebagai strategi penggandaan buku yang berisi pengetahuan yang dianggap terlarang sehingga tidak diketahui aparat. Novel *Anak Semua Bangsa* karya Pramodya Ananta Toer dianggap sebagai simbol perlawanan intelektual terhadap narasi dominan yang dikendalikan pemerintah Orde Baru. Novel karya Pramoedya mengangkat tema perjuangan dan ketidakadilan sehingga dianggap sebagai pengetahuan yang terlarang. Kesadaran aktivis mahasiswa akan adanya kebebasan berfikir, dengan cara mendiskusikan novel tersebut dimaknai dengan menggunakan kata *dosa*, kata *dosa* identik dengan pelanggaran terhadap norma-norma agama namun dalam konteks ini merepresentasikan adanya label terhadap bacaan kritis mengenai perbuatan moral yang meringkai kegiatan intelektual aktivis mahasiswa guna mengendalikan kesadaran dari hasil manipulasi yang menjadi sebuah kebenaran.

“membawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom” (Chudori: 17, 20)

Pemilihan frase *menenteng bom* menggambarkan betapa berbahayanya tindakan membaca dan mendiskusikan buku karya Pramoedya di mata aparat pemerintah, menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa berada dalam posisi yang terancam oleh kekuasaan aparat pemerintah yang represif yang menunjukkan adanya rezim kebenaran sendiri yang dibangun aparat sehingga karya tersebut menjadi berbahaya yang merepresentasikan ancaman besar jika tertangkap memiliki buku ini, yang menggambarkan kontrol pemerintah terhadap pengetahuan yang beredar di masyarakat sangat kuat. Berdasarkan relasi antar tokoh aktivis mahasiswa yang harus menyusun strategi hanya sekedar untuk menggandakan buku karya Pramoedya yang merasa selalu diawasi aparat menggambarkan ketegangan dalam hubungan sosial yang tidak setara yang sangat mencolok dalam pembatasan berkaitan dengan kebebasan untuk menyalurkan pendapat, kritik serta informasi secara bebas oleh kelompok Winatra yang juga berkaitan dengan kontrol kekuasaan melalui relasi-relasi dalam media, buku bacaan resmi, dan norma sosial masyarakat yang menentukan tindakan mana yang benar dan salah. Oleh karena itu kebebasan dalam menyuarakan dan menuntut keadilan di bawah rezim Orde Baru menjadi hak istimewa, sebab hanya bisa dimiliki oleh segelintir kelompok saja seperti intel, polisi, dan TNI menjadi pihak-pihak yang diandalkan oleh rezim Orde Baru.

Latar peristiwa novel *Laut Bercerita* yang mengangkat isu pelanggaran HAM pada masa Orde Baru berfungsi untuk kepekaan pembaca terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang tidak hanya berkaitan dengan situasi peristiwa Orde Baru namun juga saat ini, dimana budaya impunitas terhadap isu-isu HAM yang melibatkan aparat pemerintah sulit untuk bisa mendapatkan keadilan. Adanya legitimasi terhadap tindakan represif aparat terhadap aktivis mahasiswa yang melakukan upaya perjuangan yang melahirkan normalisasi dan mengakibatkan banyak korban penghilangan paksa baik di pihak aktivis mahasiswa dan orang-orang yang dituduh dekat dengan PKI. Sejalan dengan penelitian Ashri & Syahwal (2023) menemukan bahwa ditetapkannya sistem penggolongan yang samar terhadap orang-orang yang dituduh dekat dengan PKI berdasarkan redaksi hukum yang fleksibel sesuai kebutuhan kepentingan-kepentingan

tertentu yang memiliki otoritas sehingga mereka yang dituduh PKI sebagian besar tanpa bukti keterlibatan langsung dengan peristiwa G30S yang ditinjau dalam kajian hukum.

Sementara itu pada novel *Laut Bercerita* gerakan perjuangan yang menjadi hak mahasiswa dalam menuntut kebebasan justru dibatasi dengan pemberian label sebagai pemberontak, musuh negara dan simpatisan PKI. Pemberian stereotip sebagai strategi pembenaran tindakan represif aparat terhadap orang-orang yang di duga berkaitan dengan PKI harus diadili. Melalui novel *Laut Bercerita* kontrol pemerintah juga digambarkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi tidak hanya dirasakan oleh eks-tapol saja namun novel ini juga mengungkapkan keluarga mereka ikut terdampak.

“...namanya Ibu ami. Dia guru bahasa Indonesia kelas lima SD di Solo... Ibu ami menghilang begitu saja... aku mendengar peraturan Bersih Diri dan Bersih Lingkungan yang sudah diperkenalkan lebih dahulu di Jakarta dan kini diterapkan di seluruh Indonesia...“dan mereka khawatir sekali kami akan dijejali pemikiran komunisme rupanya,”... Ibu ami pindah ke kota lain, karena ayahnya dulu adalah PKI yang dieksekusi pada tahun 1965” (Chudori: 17, 34)

Penggalan dialog di atas menunjukkan salah satu peraturan bersih diri dan bersih lingkungan secara perlahan disebar oleh pemerintah. Aturan ini dinormalisasi oleh masyarakat menyebabkan masyarakat cenderung menganggap segala yang berkaitan dengan PKI adalah sesuatu yang berbahaya. Namun anggota keluarga korban yang dikatakan sebagai PKI, dieksekusi pada tahun 1965 bukan berarti benar-benar berkaitan dengan PKI karena tanpa adanya keterlibatan dalam proses pengadilan yang jelas. Diskriminasi ini berlanjut dalam struktur masyarakat, adanya isolasi yang memaksa masyarakat untuk memarginalkan anggota keluarga mantan eks-tapol yang ditunjukkan melalui cerita tokoh ibu Ami yang diberhentikan dari pekerjaannya. Kekuasaan ditunjukkan melalui kebijakan negara sehingga membentuk narasi yang beredar dari hasil kontrol yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah untuk memarginalkan orang-orang seperti ibu Ami. Seperti dialog berikut:

“...Aku bertanya pada Bapak yang saat itu bekerja di Harian Solo. Karena saat itu aku masih duduk di kelas lima sekolah dasar, Bapak mencoba memberi semacam perspektif yang netral, tapi tidak manipulatif seperti yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari” (Chudori: 17, 34)

Kata *manipulatif* di atas menggambarkan pengetahuan yang beredar pada masa Orde Baru bukanlah sesuatu yang netral namun pengetahuan ini diciptakan oleh adanya kepentingan pemerintah. Sehingga diskriminasi yang dilakukan terhadap pihak yang dicap berkaitan dengan PKI dapat dinormalisasi menjadi rezim kebenaran tersendiri pada masa itu sebagai hasil dari proses korelasi antara kekuasaan yang memproduksi pengetahuan oleh orang-orang yang berkemungkinan untuk menentukan isi dari pengetahuan.

#### **Pemberian Stereotip melalui Media dan Aparat Pemerintah terhadap Aktivistis Mahasiswa**

Teks novel *Laut Bercerita* menggambarkan pemberian stereotip negatif dari masyarakat yang membentuk identitas aktivis mahasiswa oleh masyarakat, media dan aparat sehingga dengan stereotip negatif, timbul normalisasi tindakan represif aparat pemerintah terhadap aktivis mahasiswa.

“...hidup tertata rapi dan “steril dari kuman” (Chudori: 17, 28) Di masa buron seperti ini segala medium komunikasi dengan keluarga harus diminimalisir (Chudori: 17, 51) Mata Merah menatapku. Bibirnya mencibir. “Membagi secara rata? Seperti ajaran komunis, begitu?” (Chudori: 17, 96)

Kata Sinonim *kuman*, *buron*, dan *komunis* menggambarkan stereotip yang diberikan aparat terhadap aktivis mahasiswa sebagai bentuk internalisasi aparat secara halus yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Aparat menjadi perpanjangan tangan negara sebagai salah satu moral keamanan yang mendisiplinkan penolakan mahasiswa. Upaya yang dilakukan kekuasaan untuk menormalisasi tindakan represif dalam menekan aktivis mahasiswa yaitu dengan pemberian stereotip negatif.

“...Sok ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI? Pidato-pidato ariin Bramantyo kan membela petani dan buruh. Persis PKI! (Chudori: 17, 97) hanya nyamuk-nyamuk... Kerikil dalam sepatu mereka (Chudori: 17, 182) mereka menangkap 200 “cacing tawuran” dan belum berhasil menjerat “gembong” (Chudori: 17, 204) alex yang saat itu masih bergerak di bawah tanah bersama Mas Laut dan kawan kawan karena Winatra dan Wirasena dinyatakan organisasi terlarang pada tahun 1996 memberanikan diri mengirim sebuah pesan singkat tanpa tanda tangan Namanya (Chudori: 17, 240).

Kalimat di atas menunjukkan penggunaan sinonim *cacing tawuran*, *hanya nyamuk-nyamuk*, *organisasi terlarang*, dan *gembong* menggambarkan stereotip yang dilekatkan oleh media pada masa Orde Baru yaitu koran Metro berdasarkan konteks novel, koran Metro memiliki hubungan dekat dengan para pejabat politik masa Orde Baru, sehingga koran Metro menciptakan narasi dalam menggiring opini masyarakat bahwa aktivis mahasiswa menjadi ancaman bagi stabilitas negara. Kata *gembong* merepresentasikan dengan pemimpin kelompok kriminal seperti geng atau sindikat, aktivis mahasiswa digambarkan sebagai pihak yang berperan penting dalam menciptakan kekacauan dan kerusuhan.

Tidak hanya media, stigma ini juga diciptakan oleh aparat pemerintah yaitu menggunakan kata sinonim *PKI*, *komunis*, *musuh negara* menggambarkan gerakan aktivis mahasiswa sebagai tindakan yang terlarang, sehingga dengan beredarnya stigma yang merekonstruksi identitas gerakan aktivis mahasiswa terkait dengan PKI, sehingga dengan mengaitkan aktivis mahasiswa dengan kegiatan PKI memberi alasan aparat untuk melakukan tindakan represif, dengan dalih dilakukan untuk menjaga keamanan negara. Tindakan represif itu berupa penyiksaan seperti *disentrum*, *menggampar*, dan *tembak ditempat* yang dilakukan terhadap aktivis mahasiswa Winatra karena tindakan mereka dalam membela dan menyuarkan hak-hak petani seperti warga Kedung Ombo dan Blanggun. Tindakan ini dianggap sebagai kewajiban oleh aparat pemerintah pada masa rezim Orde Baru melalui strategi pemberian stigma kepada aktivis mahasiswa.

### Resistensi Penulis terhadap Narasi Formal Pemerintah Orde Baru

Pada bagian ini akan dilihat bentuk resistensi penulis dalam membangun narasi melalui tokoh novel *Laut Bercerita*, seperti tokoh utama Biru Laut dan teman-temannya dari organisasi Wintra dan Wirasena yang memperjuangkan hak kebebasan dalam mendapatkan sumber bacaan. Dengan meninjau teks keseluruhan dari novel *Laut Bercerita*, dapat disimpulkan narasi novel dikonstruksi sarat akan ideologi penulis yang mengkritik kebijakan dan peristiwa ketidakadilan yang berlatar pada masa rezim Orde Baru yang telah berdiri kokoh selama 32 tahun. Ditemukan bahwa kekuasaan yang tersebar dalam relasi mikro aktivis mahasiswa dalam lingkungannya membentuk pengetahuan yang menjadi kebenaran di kalangan aktivis mahasiswa berupa pengetahuan alternatif yaitu pengetahuan bukan dari hasil pemerintah Orde Baru namun yang terbentuk dari narasi tokoh sehingga merepresentasikan sebagai salah satu novel yang mengkritik pemerintah yang dinarasikan oleh Leila melalui penggalan dialog berikut:

“...membawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom” (Chudori: 17, 20)

Penggalan dialog dari Biru Laut di atas dengan menggunakan kata *bom* merepresentasikan ancaman besar jika tertangkap memiliki buku karya Pramoedya, yang menggambarkan kontrol pemerintah terhadap pengetahuan yang beredar di masyarakat sangat kuat. Namun betapun berbahayanya kegiatan tersebut prinsip kebebasan yang berusaha diperjuangkan oleh aktivis mahasiswa sehingga kegiatan diskusi buku karya Pramoedya merupakan langkah yang sudah seharusnya dilakukan oleh mahasiswa sebagai upaya dalam membentuk kesadaran mahasiswa dalam situasi sosial dan politik sehingga setiap kelompok masyarakat memiliki rezim kebenarannya tersendiri. Bagi aktivis mahasiswa Winatra karya-karya yang dianggap terlarang oleh pemerintah justru dianggap sebagai bacaan wajib bagi mahasiswa dalam membangkitkan semangat perjuangan mereka. Sementara itu, tindakan mendiskusikan karya Pramoedya dilihat berkaitan dengan pembatasan terhadap bacaan yang dianggap terlarang sebagai sarana untuk membangun kembali rasa kekuatan individu juga kepastian moral di bawah tekanan rezim. Kegiatan diskusi tersebut menjadi sebuah normalisasi di kalangan aktivis mahasiswa yang memiliki keyakinan tindakan itu untuk mendapatkan kebebasan berfikir tanpa adanya batasan dari pemerintah. Pengetahuan tersebut harus diperjuangkan dalam relasi gerakan mahasiswa.

Frase *mendampingi petani*, *menuntut demokrasi* dan *membangun kesadaran kelas* menggambarkan bagaimana penulis novel yaitu Leila S. Chudori menggambarkan identitas mahasiswa sebagai pihak yang menuntut keadilan, pihak yang berkorban dalam gerakan perjuangan membela hak-hak masyarakat yang tertindas di masa Orde Baru, sehingga sangat kontras dengan narasi yang disebar oleh pemerintah Orde Baru bahwa aktivis sebagai penghianat negara, sehingga hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran pembaca akan isu-isu pelanggaran HAM terhadap realitas sosial dan politik yang menimpa aktivis mahasiswa saat itu.

“...Menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka ...Sekitar tujuh orang, satu per satu diinterogasi dan ditempeleng, disiram air, ditelanjangi” (Chudori: 17, 25).

Pada kalimat di atas mengandung kosakata nilai ekspresif, berupa evaluasi terhadap aparat pemerintah, dengan menjadikan penjahat para aktivis mahasiswa dalam menuntut keadilan. Salah satunya yang keterlibatan aktivis mahasiswa pada peristiwa yang menimpa warga Kedung Ombo seperti kalimat berikut:

“...Kinan bercerita bagaimana warga Kedung Ombo yang di janjikan ganti rugi tiga ribu rupiah per meter persegi dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi 250 rupiah per meter persegi. Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi, tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi” (Chudori: 17, 25).

Kalimat di atas berisi upaya Leila dalam memunculkan realitas ketidakadilan melalui kasus konflik lahan warga Kedung Ombo secara nyata didiskriminasi oleh aparat pemerintah hingga terjadinya intimidasi yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM, disebabkan perlakuan tidak adil dan intimidasi dari aparat pemerintah. Hal itu pula yang dialami oleh aktivis mahasiswa seperti Kinan dan Bram yang berusaha membela hak-hak warga Kedung Ombo dalam mendapatkan keadilan seringkali harus mendapatkan penyiksaan. Penyiksaan ini mengindikasikan tindakan aktivis mahasiswa disamakan dengan perilaku kejahatan yang menentang pemerintah. Berdasarkan teks di atas terlihat praktik-praktik pemerintah yang mengkriminalkan gerakan aktivis mahasiswa Winatra dan Wirasena. Leila berusaha memunculkan kembali kesadaran masyarakat melalui novel *Laut Bercerita*.

Leila mengkonstruksikan keberadaan aktivis mahasiswa melalui peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang memosisikan aktivis mahasiswa sebagai korban yang termaginalkan, sebagai cerminan persepsi rezim Orde Baru yang memandang gerakan aktivis mahasiswa melalui kelompok Winatra dan Wirasena disamakan dengan aksi-aksi kriminal yang harus mendapatkan tindakan represif dari aparat. Kondisi sosial ini diproduksi melalui teks dalam novel sehingga akhirnya dikonsumsi pembaca. Narasi yang diciptakan pemerintah syarat dengan kepentingan dan ideologi di dalamnya, disebabkan narasi tersebut bersifat dogma-dogma yang di doktrin rezim Orde Baru, sehingga ideologi anti komunis yang dikonstruksi ditemukan pada buku pembelajaran di sekolah dapat mengontrol pengetahuan yang beredar sesuai dengan kepentingan rezim Orde Baru. Narasi resmi ini kemudian mempengaruhi Leila dalam menulis teks novel *Laut Bercerita*. Narasi dalam teks novel ini sebagai bentuk resistensi terhadap narasi resmi yang terikat dengan kontrol kepentingan rezim Orde Baru sehingga memiliki keterbatasan dalam menggambarkan realitas-realitas yang terbungkam pada masa Orde Baru, bentuk intertekstualitas dapat ditemukan dalam penggalan dialog berikut.

“...Bapak mencoba memberi semacam perspektif yang netral, tapi tidak manipulatif seperti yang tertera pada sejarah resmi yang kita pelajari” (Chudori: 17, 34).

Pada penggalan dialog tersebut ditemukan negasi intertekstual dengan pemilihan kata *manipulatif* yang dinegasikan adalah frase *sejarah resmi*. Kata *manipulatif* berkaitan dengan narasi PKI digambarkan dalam buku-buku pelajaran sekolah sebagai partai terlarang dan berbahaya dengan mengaitkan PKI pada peristiwa G30S, sehingga tindakan pemerintah yang dinarasikan dengan pembersihan PKI dianggap sebagai tindakan yang wajar. Pendidikan melalui buku-buku pembelajaran yang menyebarkan narasi resmi pemerintah yang membentuk narasi tunggal anti-PKI. Wacana yang dimunculkan dengan maksud novel *Laut Bercerita* hadir sebagai respon dan kritik terhadap narasi resmi yang *manipulatif*, hal itu secara tegas disampaikan oleh Leila dalam penggalan dialog di atas, oleh karena itu novel *Laut Bercerita* banyak menyoroti dan memunculkan peristiwa-peristiwa yang terpinggirkan di bawah rezim Orde Baru, dimana narasi dalam novel ini tidak sepenuhnya terpengaruh oleh sosial kontrol pemerintah, sehingga realitas yang hadir dalam novel membentuk kesadaran pembaca terhadap isu-isu yang selama ini dibungkam rezim Orde Baru. Leila menulis novel ini berisikan pesan-pesan ideologis yang tidak secara langsung disadari oleh pembaca. Novel *Laut Bercerita* sebagai respon terhadap persoalan sosial khususnya pelanggaran HAM berat di masa 1998 yang belum menemui keadilan secara hukum. Novel ini bukanlah satu-satunya novel yang berisi kritikan terhadap pemerintah, namun novel ini mampu menggambarkan dan memunculkan kembali isu terkait pelanggaran HAM terkhusus yang dialami oleh aktivis mahasiswa tahun 1998.

Novel ini kemudian diadaptasi menjadi film pendek dengan judul yang sama. Melalui novel dan film pendeknya ini Leila memunculkan diskusi-diskusi yang diadakan bersama organisasi yang bergerak di bidang HAM seperti LBH Jakarta serta diskusi yang diadakan diberbagai kampus seperti ITB, UGM, UNESA, UNSIL, UKI, UNPAR, UMM, UNDIP, STMM, dan UPM dalam bentuk webinar yang sebagian besar diisi oleh Leila S. Chudori sebagai pembicara dalam webinar tersebut. Tujuannya adalah agar peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1998 tidak terpinggirkan. Berdasarkan wawancara Leila mengungkapkan bahwa “*Ya, kalau mau dikatakan ada misi, kemungkinan ada misi hak asasi manusia (HAM) itu jelas sekali*” (Dharma (2021)). Leila S. Chudori sebagai penulis novel berperan penting dalam menentukan wacana yang ingin dia bangun terkait peristiwa penting yang belum mendapat keadilan, seperti peristiwa 1998 di masa Orde Baru, novel ini juga berfungsi sebagai ruang bagi korban dan masyarakat untuk berbicara tentang pengalaman mereka yang selama ini terbungkam.

Respon pembaca terhadap novel *Laut Bercerita* dapat dilihat pada platform *goodreads* dan beberapa *chanel Youtube* yang memuat ulasan-ulasan pembaca novel ini terlihat mampu mempengaruhi pembaca. Wacana yang dibangun oleh Leila dalam *Laut Bercerita* berhasil mempengaruhi pembaca untuk merasakan

---

ketegangan politik dan sosial yang ada pada masa itu, meskipun pembaca tersebut tidak hidup pada masa tersebut. Wacana ini berhasil membangkitkan rasa empati dan pemahaman pembaca terhadap peristiwa ketidakadilan di masa lalu, serta menunjukkan novel ini dapat menciptakan kesadaran politik yang kuat bahkan setelah puluhan tahun berlalu sejak rezim tersebut runtuh. Sehingga, tahap konsumsi dalam analisis wacana ini memperlihatkan bahwa wacana yang disampaikan oleh penulis dalam novel ini berhasil menggerakkan pembaca untuk merenung dan mengkritisi pelaksanaan HAM di Indonesia yang belum selesai melalui film pendek *Laut Bercerita* kembali menghidupkan diskusi di ruang-ruang kampus melalui webinar, serta membuka mata mereka tentang dampak jangka panjang dari kekuasaan yang otoriter.

### Pembahasan

Menurut pandangan Foucault (2002) tentang kekuasaan dan pengetahuan, dimana kekuasaan dan pengetahuan versi Foucault memiliki hubungan timbal balik. Ketika kekuasaan beroperasi untuk menegakkan kebenaran dalam sebuah wacana yang menimbulkan rezim kebenaran, sebagai sebuah pengetahuan yang diyakini masyarakat saat itu. Sejalan dengan itu Foucault (1972) juga menyampaikan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang menyebar dan halus di seluruh jaringan sosial, kekuasaan tidak terpusat pada pemilikan satu orang. Penelitian ini apabila dikaitkan dengan teori kekuasaan dan pengetahuan Foucault menemukan bahwa tindakan kekerasan dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap aktivis mahasiswa digambarkan dalam novel telah menjadi bagian dari struktur hegemonik seperti pada peraturan-peraturan yang mengekang aktivis mahasiswa dan mereka yang dianggap sebagai simpatisan PKI sebagai bentuk kekuasaan. Kemudian dinormalisasi menjadi sebuah kebenaran, sehingga membentuk realitas sosial di masyarakat, dimana kebenaran diperoleh melalui pengetahuan. Tindakan represif aparat pemerintah terhadap aktivis mahasiswa sudah dianggap sebagai suatu kewajiban bahkan membuat masyarakat menuntut tindakan itu perlu dilakukan, akibat mekanisme pemberian stereotip komunis melalui media maupun aparat itu sendiri. Mekanisme ini menjadi bagian dari disiplin yang diterapkan secara terus menerus melalui pengawasan, sehingga membatasi kebebasan aktivis mahasiswa Winatra dan Wirasena yang digambarkan melalui narasi dalam novel *Laut Bercerita*.

Novel *Laut Bercerita* menggambarkan kekuasaan yang tersebar dalam lembaga militer seperti polisi, TNI, dan intel salah satu pihak yang berperan dalam melekatkan stereotip *komunis* dan *cara-cara PKI* terhadap gerakan demonstrasi kelompok Winatra dan Wirasena, sehingga memunculkan realitas baru yang berafiliasi dengan media massa, melalui kekuasaannya, Koran Metro yang ikut menyebarkan berita yang membuktikan pengetahuan akan stereotip komunis itu sesuatu yang benar dengan mengidentikkan gerakan demonstrasi aktivis mahasiswa sebagai tindakan yang memunculkan kerusuhan. Sehingga adanya normalisasi terhadap tindakan represif seperti penangkapan dan penghilangan paksa terhadap tokoh aktivis mahasiswa Biru Laut dan teman-temannya dengan dalih untuk keamanan negara. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Indahni (2022), menunjukkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus ini salah satu dari banyaknya implikasi kekuasaan membuat orang dapat melegitimasi tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri disebabkan melemahnya norma sosial berdasarkan perspektif anomie Emile Durkheim.

Penelitian mengenai tindakan represif aparat pemerintah terhadap mahasiswa yang melakukan unjuk rasa ini telah dilakukan oleh Susanto (2025), Susanto menemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi saat mahasiswa melakukan unjuk rasa, yang mengindikasikan adanya unsur-unsur pelanggaran kode etik kepolisian. Penelitian ini hanya terbatas pada efektivitas Undang-Undang Dasar sebagai instrumen normatif dalam melindungi warga negara, belum menganalisis mekanisme lain di luar jalur hukum yang berkaitan dengan konstruksi media dan relasi sosial yang lebih luas. Sementara itu melalui novel *Laut Bercerita* tindakan represif dilakukan oleh polisi dan tantara rezim Orde Baru terhadap Biru Laut dan teman-temannya digambarkan berupa tindakan penangkapan, penyiksaan, intimidasi, teror, pembungkaman hak berpendapat, pemberangusan buku yang dianggap kiri, penghilangan paksa tanpa proses hukum dan pemberian stigma negatif terhadap aktivis mahasiswa pro-demokrasi, buruh dan petani.

Dalam novel *Laut Bercerita* aparat digambarkan tidak sesuai dengan fungsi idealnya seperti yang diharapkan masyarakat sebagai instrumen yang melindungi masyarakat sipil, sehingga praktik represif aparat mendiskriminasi masyarakat sipil serta melibatkan dugaan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat seperti penelitian Widiyanti (2023) menunjukkan keterlibatan aparat gabungan dari TNI, Polri terhadap sengketa lahan masyarakat Pulau Ramping, kepulauan Riau dengan PT. Makmur Elok Grahara, adanya keterlibatan tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat serta pengusiran 16 warga dengan alasan relokasi, sehingga negara melalui aparatnya menjadi alat kekuasaan perusahaan yang meminggirkan prinsip HAM. Sementara itu dalam novel *Laut Bercerita*, ambisi rezim Orde Baru dalam mendorong modernisasi justru diterapkan dengan diskriminasi terhadap masyarakat sipil tertentu yang digambarkan dalam novel seperti pada warga Kedung Ombo yang mengalami pengusuran atas lahan pertanian mereka yang dinormalisasi dengan mengatasnamakan pembangunan nasional tanpa dasar pengadilan dan ganti rugi yang

---

memadai. Kekuasaan menggunakan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam membenarkan pengusuran atas alih fungsi lahan pertanian mereka. Kebijakan ini kemudian menjadi produk pengetahuan yang diciptakan melalui kekuasaan. Novel ini menggambarkan kekuasaan rezim Orde Baru menggunakan aparat sebagai instrumen untuk meredam resistensi rakyat. Hal ini tentu tidak sekadar berdampak pada warga Kedung Ombo saja namun pengetahuan ini mengontrol persepsi publik untuk tidak mempertanyakan mengapa lahan warga kedung Ombo dialihfungsikan dan melegitimasi kelanjutan penerapan kebijakan pemerintah yang serupa.

Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa kekuasaan pemerintah dalam memproduksi pengetahuan yang dimanfaatkan sebagai normalisasi terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap kelompok Winatra, Wirasena, buruh di Yogya, petani di Kedung Ombo dan petani di Blangguan. Sejalan dengan penelitian [Irwanto \(2025\)](#) menunjukkan hubungan antara media detik.com yang memproduksi pemberitaan mengenai konflik lahan di Rempang, antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait proyek Rempang Eco City yang menunjukkan informasi yang disebar oleh detik.com sebagai bentuk usaha peminggiran hak-hak masyarakat adat Rempang. Sementara itu dalam novel *Laut Bercerita* menunjukkan normalisasi hadir dengan pemberian stereotip dengan mengelompokkan masyarakat yang menyuarakan keadilan seperti kelompok Winatra, buruh, dan petani dianggap menentang kebijakan pemerintah Orde Baru yang dilegitimasi oleh media seperti Koran Metro dan aparat pemerintah, dengan mengaitkan mereka sebagai simpatisan PKI yang menjadi sebuah kebenaran.

Kebenaran ini menjelma menjadi pengetahuan dalam masyarakat yang diproduksi oleh kekuasaan aparat sebagai bentuk legitimasi terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Jika dibandingkan dengan penelitian [Irwanto \(2025\)](#), penelitian ini melengkapi penelitian tersebut dengan memunculkan kompleksitas hubungan antara pemberian label yang dilekatkan oleh aparat terhadap aksi demonstrasi kelompok Winatra, buruh dan petani sebagai simpatisan PKI yang dibuktikan oleh media seperti koran Metro dengan menyebarkan pemberitaan dengan mengkriminalkan aksi demonstrasi disejajarkan dengan tindakan yang memicu kerusuhan. Sehingga tidak hanya di masa Orde Baru, media hingga saat ini masih menjadi instrumen yang berpihak pada kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

Pemberian stereotip tidak hanya berdampak pada masa Orde Baru saja namun efeknya terus dirasakan hingga saat ini dengan masih berlanjutnya Aksi Kamisan sebagai bentuk upaya yang masih diperjuangkan oleh keluarga dari korban penghilangan paksa aktivis mahasiswa 1998. Aksi Kamisan menurut [Putri \(2025\)](#) yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus sebagai bentuk gerakan simbolik yang terstruktur dan damai yang membangun kekompakan masyarakat dalam mempertahankan isu HAM menurut teori gerakan sosial repertoar Charles Tilly. Sementara itu penelitian ini mendapati berdasarkan pilihan kata dalam teks novel *Laut Bercerita*, menggambarkan perjuangan keluarga korban penghilangan paksa merepresentasikan normalisasi rezim kebenaran yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru melalui pengetahuan yang dinternalisasi pada nilai dan norma yang disebar melalui interaksi sosial yang mempengaruhi asumsi masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui perjuangan tokoh Asmara Jati, adik dari Biru Laut yang mengalami peristiwa penghilangan paksa. Perjuangan itu berupa aksi Payung Hitam di hari Kamis yang terus dilakukan hingga berselang 9 tahun setelah Biru Laut dan 12 orang temannya dinyatakan hilang.

Aksi Kamisan ini disuarakan di depan Istana Negara bersama keluarga korban penghilangan paksa lainnya, Aksi Kamisan sebagai gambaran adanya impunitas terhadap pelaku penghilangan paksa. Impunitas hadir seolah menjadi legitimasi terhadap peristiwa penghilangan paksa itu sendiri. Impunitas juga menjadi bukti kegagalan fungsi ideal sistem hukum yang seharusnya menjadi sarana bagi keluarga korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan. Keberhasilan pengetahuan yang disebar rezim Orde Baru bahwa gerakan kelompok Winatra itu terlarang maka pembersihan terhadap kelompok ini dianggap sebagai suatu kewajaran dengan dalih keamanan negara. Hal itu berdasarkan pandangan Foucault bahwa kekuasaan memproduksi pengetahuan sehingga menimbulkan efek timbal balik antara kekuasaan dengan pengetahuan. Sejalan dengan penelitian [Harrison \(2021\)](#) mengungkapkan mekanisme praktik impunitas adalah bagian dari alat politik dengan melibatkan penyensoran terhadap jurnalistik dari 40 editor dan jurnalistik pada lima negara.

Sementara itu, isu yang diangkat Leila mengenai pengasingan terhadap peristiwa penghilangan paksa menunjukkan adanya impunitas terhadap pelaku. Perjuangan tokoh Biru Laut dan teman-temannya dalam kelompok Winatra dan Wirasena digambarkan dengan serangkaian tindakan represif pemerintah yang menimbulkan kelompok Winatra, Wirasena dan keluarga mereka yang turut terisolasi dari masyarakat, jelas sekali menunjukkan Leila sangat berpihak terhadap korban dan keluarga korban penghilangan paksa. Novel ini sebagai bentuk upaya resistensi Leila dalam menyuarakan HAM. Bahasa yang digunakan dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori, tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai sarana persuasi yang secara tidak sadar pembaca ikut meyakini ideologi yang ditanamkan oleh Leila yang berusaha mengkritik tindakan rezim Orde Baru.

## Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan tersebar luas dalam sistem hubungan dan interaksi dalam lembaga sosial seperti lembaga hukum, militer, pendidikan dan media. Kekuasaan memproduksi pengetahuan melalui lembaga sosial itu berkaitan dengan pemberian stereotip komunis yang melabeli kelompok Winatra dan Wirasena dalam novel *Laut Bercerita*. Hal ini disebabkan isu pelanggaran HAM berat di Indonesia belum diselesaikan melalui jalur hukum. Penelitian ini mengungkapkan strategi kekuasaan dan pengetahuan dalam kebijakan pemerintah Orde Baru sebagai upaya melemahkan tindakan kritik mahasiswa yang digambarkan melalui novel *Laut Bercerita*. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan aparat pemerintah memproduksi pengetahuan yang beredar dalam masyarakat terkait pemberian stereotip komunis terhadap gerakan kelompok mahasiswa Winatra dan Wirasena. Stereotip yang diedarkan menjadi sebuah kebenaran sehingga menjadi kebenaran rezim Orde Baru. Stereotip ini juga diperkuat oleh berita koran Metro yang mensejajarkan gerakan demonstrasi mahasiswa dengan gerakan penyebab kerusakan, sehingga memunculkan normalisasi tindakan represif aparat terhadap aktivis mahasiswa yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Teks novel *Laut Bercerita* yang dibangun oleh Leila tidak terlepas dari pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan Leila terhadap wacana dalam novel, sehingga novel ini juga sebagai bentuk resistensi Leila terhadap narasi resmi pemerintah. Implikasi dari hasil penelitian ini menyoroti pentingnya kajian kritis terhadap wacana yang berkembang di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan yang diproduksi syarat akan kepentingan-kepentingan tertentu sehingga bukan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Implikasi penelitian ini adalah agar masyarakat memiliki kesadaran pentingnya penegakan HAM berat di masa lalu, sehingga melalui novel *Laut Bercerita* dapat menjadi konscientisasi, yang dapat memunculkan realitas-realitas akan isu pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terpinggirkan. Penelitian ini masih terbatas menggunakan satu novel sebagai subjek penelitian, Oleh karena itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang berpotensi menggunakan beberapa novel guna melihat pola-pola dalam masyarakat yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Amnesty. (2024). Pemerintah Indonesia kerdilkan fakta dan kondisi HAM di Sidang ICCPR. Amnesty International Indonesia.
- Anindita, M. E., & Anasta, P. C. (2024). Menyelami Sejarah Kelam G30S/PKI lewat 5 Novel Best Seller Ini. <https://www.gramedia.com>.
- Ashri, A. M., & Syahwal. (2023). Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum Dan Politik Atas Diskriminasi Terhadap Eks Tahanan Politik PKI. *Journal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 221–243. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1070>
- Astuti, T. A. (2025). *Perjalanan Panjang Novel Laut Bercerita hingga Cetak Ulang ke-100*. Detik.Com. 20 Juli 2025. <https://www.detik.com/pop/culture/d-8013160/perjalanan-panjang-novel-laut-bercerita-hingga-cetak-ulang-ke-100>
- BBC. (2025). *Mereka adu domba kami Masyarakat adat Solidaritas Merauke deklarasi menolak Proyek Strategis Nasional*. BBC.Com. 14 April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpde5158p160>
- Chudori, L. S. (2017). *Laut Bercerita*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Daud, Y. S., & Bagtayan, Z. A. (2024). Kajian Sosiologi Sastra dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 14(1), 18-27. <https://doi.org/10.37905/jbsb.v14i1.23451>
- Dharma, S., & MariaCh. (2021). Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori Memicu Milenial Menengok Sejarah. [https://www.gramedia.com/blog/laut-bercerita-karya-leila-s-chudori-memicu-milenial-menengok-sejarah/?srsltid=AfmBOoqcjaL7GwliXtHqluZvuT58OIdTI\\_fIXd0\\_fhh-cdC0Jq13Cnip](https://www.gramedia.com/blog/laut-bercerita-karya-leila-s-chudori-memicu-milenial-menengok-sejarah/?srsltid=AfmBOoqcjaL7GwliXtHqluZvuT58OIdTI_fIXd0_fhh-cdC0Jq13Cnip)
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language Second Edition*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge and the Discourse of Language*. New York: (terjemahan oleh A.M.S. Smith). In *Pantheon Books*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Foucault, M. (2002). *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengtahuan terj. Yudi Santosa*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Ginting, D. A., & Yuhdi, A. (2023). Eksistensi Perempuan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Feminisme Eksistensial dan Relevansinya sebagai Materi Ajar Sastra Indonesia di SMA. *Protasis*, 2(1), 112–127. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i1.79>
- Halliday, M. A. K. (1993). *Writing Science: Literacy and Discursive Power*. London: The Palmer Press.

- Harrison, J., & Pukallus, S. (2021). The politics of impunity: A study of journalists' experiential accounts of impunity in Bulgaria, Democratic Republic of Congo, India, Mexico and Pakistan. *Journalism*, 22(2), 303–319. <https://doi.org/10.1177/1464884918778248>
- Indahni, A., Ramadhani Cassanti, & Ranti Miranda uliarta Manalu. (2022). Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 2(1), 21–33. [https://doi.org/10.33830/humaya\\_fhisip.v2i1.3201](https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3201)
- Irwanto, I., Hariatiningsih, L. R., Faizin, Z., & Parnando, T. (2025). Analisa Sosial Teks Konflik Tanah Rempang Pada Media Daring Detik.Com. *Communication*, 16(1), 14–28. <https://doi.org/10.36080/comm.v16i1.3310>
- Jasmine, A. (2024). Aksi Kamisan ke-815 Peringati 26 Tahun Tragedi Trisakti, Aktivis Tuntut Penuntasan Pelanggaran HAM Berat. *Tempo*. 02 Januari 2025. <https://www.tempo.co/hukum/aksi-kamisan-ke-815-peringati-26-tahun-tragedi-trisakti-aktivis-tuntut-penuntasan-pelanggaran-ham-berat-58378>
- KontraS. (2017). Edisi Melawan Lupa. *Kontras.Com*, 14, 1–8. [www.kontras.org](http://www.kontras.org)
- Meitridwiastiti, A. A. A. (2022). Penggunaan Gaya Bahasa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *Paramasastra*, 9(2), 211–226. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v9n2.p211-226>
- Nainggolan, E. M., & Afriyanti, A. A. (2023). Analisis Makna Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori (Kajian Semantik). *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 4(1), 01–19. <https://doi.org/10.37304/enggang.v4i1.12082>
- Nastitie, D. P. (2024). Mekanisme non-yudisial yang diharapkan mendengarkan korban, diberdayakan, dan dipulihkan, nyatanya ditolak. <https://www.kompas.id>
- Nurita, D. (2022). Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Buka Jalur Non-Yudisial Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu. *Tempo*. 23 Desember 2025. <https://www.tempo.co/hukum/mahfud-md-ungkap-alasan-pemerintah-buka-jalur-non-yudisial-selesaikan-pelanggaran-ham-masa-lalu-304915>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG: Hlm 29, 1–29. 26 Desember 2025. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf)
- Presiden-RI. (2022). Keputusan Presiden RI 17/2022 Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. *Kemensesneg RI*, 155039, 1–7. 26 Desember 2024. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176826/Salinan\\_Keppres\\_Nomor\\_17\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176826/Salinan_Keppres_Nomor_17_Tahun_2022.pdf)
- Putra, M. Y., & Irwansyah, I. (2019). Penyelesaian Non-Yudisial Terhadap Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu: Tinjauan Sosiologi Peradilan. *Tanjungpura Law Journal*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.26418/tlj.v2i1.25602>
- Putri, H. L., Ali, I. K., Aziza, W., & Panggabean, Y. P. (2025). Aksi Kamisan ; Tolak RUU TNI sebagai Representasi Pemuda dan Gerakan Sosial menurut Perspektif Charless Tilly. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 260–268. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i2.1866>
- Putri, N. B., & Nursaid. (2023). Orientasi budaya dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori terhadap waktu dan implikasinya dalam pembelajaran teks novel. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 46–62. <https://doi.org/10.47861/jdan.v1i1.102>
- Sahertian, M. K. B., Nurulhady, E. F., Suryadi, M., & Laluna, F. R. (2024). Sebuah pemikiran perlawanan Chudori terhadap cengkeraman kekuasaan dalam Laut Bercerita. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 335–346. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i2.969>
- Setneg. (2023). Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 22 Desember 2024.
- Susanto, Y., & Yusuf, H. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk*. 2(6), 196–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497885>
- Widiyanti, P., Rosida, L., Rifai, M., Saputra Angeli, K., & Maskur Ali. (2023). Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang. *Visi Sosial Humaniora*, 4(1), 29–37. <https://doi.org/10.51622/vsh.v4i2.1968>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies (3rd ed.)*. London: SAGE Publications.
- Yolanda, A., & Asri, Y. (2023). Masalah Sosial dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori dan Implikasinya dalam Pembelajaran Teks Novel. *Journal of Education Language and Innovation*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.24036/jeli.v1i2.29>